



Peran Yonzipur 5/ABW dalam Memperkuat Ketahanan Wilayah melalui Program Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Indonesia–Malaysia

The Role of Yonzipur 5/ABW in Strengthening Regional Resilience through Community Welfare Programs at the Indonesia–Malaysia Border

Ekashiva Raja Adilah, Mhd Halkis, Ari Pitoyo Sumarno

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak. Wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat merupakan kawasan strategis dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar yang terbatas, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan keamanan yang dapat memengaruhi ketahanan wilayah. Dalam konteks ini, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia, khususnya Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) melalui Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas, kendala, dan strategi Yonzipur 5/ABW dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yonzipur 5/ABW berperan melalui pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan bantuan rumah layak huni, serta kegiatan nonfisik berupa pembinaan teritorial dan pemberdayaan masyarakat. Kendala utama meliputi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, dan adaptasi tugas operasional. Strategi yang diterapkan menekankan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, dan pendekatan teritorial berbasis kesejahteraan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Keterlibatan Yonzipur 5/ABW berkontribusi dalam memperkuat ketahanan wilayah dan mendukung pertahanan negara melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disarankan adanya peningkatan dukungan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan alokasi sumber daya guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan.



Kata kunci: Strategi Pertahanan, Yonzipur 5/ABW, Perbatasan RI–Malaysia, OMSP, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract. *The Indonesia–Malaysia land border region in West Kalimantan represents a strategically important area for safeguarding national sovereignty and defense. However, the region continues to face persistent challenges, including limited infrastructure, restricted access to basic services, and relatively low levels of community welfare. These conditions may generate social and security vulnerabilities that can affect regional resilience. In this context, the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly the 5th Combat Engineer Battalion Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) deployed under the Border Security Task Force (Satgas Pamtas), plays a significant role not only in maintaining territorial security but also in supporting government efforts to enhance the welfare of border communities. This study aims to analyze the duties, constraints, and strategies of Yonzipur 5/ABW in assisting the government in improving community welfare in the West Kalimantan border area. The research employs a qualitative approach using interviews, document analysis, and literature review. Data were analyzed using an interactive model consisting of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Yonzipur 5/ABW contributes through physical development initiatives, such as the construction of roads, bridges, and assistance for livable housing, as well as non-physical activities including territorial development and community empowerment programs. The primary constraints include difficult geographical conditions, budget limitations, and operational adaptation challenges. The strategies adopted emphasize cross-sectoral coordination, resource optimization, and a welfare-oriented territorial approach within the framework of Military Operations Other Than War (OMSP). The involvement of Yonzipur 5/ABW contributes to strengthening regional resilience and supporting national defense through the enhancement of community welfare. The study recommends increased institutional support, interagency coordination, and resource allocation to optimize mission effectiveness in border regions.*

Keywords: *Defense Strategy, Yonzipur 5/ABW, Indonesia–Malaysia Border, Military Operations Other Than War (OMSP), Community Welfare.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas, dengan luas daratan sekitar 1.922.570 km² dan wilayah perairan mencapai 3.257.483 km². Indonesia juga berbatasan langsung dengan sepuluh negara, baik melalui perbatasan darat maupun laut, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura,



Thailand, Vietnam, Filipina, India, Palau, dan Australia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Kondisi geografis tersebut menempatkan wilayah perbatasan sebagai kawasan strategis sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun nonmiliter.

Wilayah perbatasan memiliki arti penting dalam konteks kedaulatan negara, pertahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Perbatasan negara bukan hanya sekadar garis pemisah administratif, tetapi juga merupakan simbol kedaulatan dan identitas nasional yang harus dijaga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara). Namun demikian, banyak wilayah perbatasan Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik yang rendah, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2020).

Wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia merupakan salah satu kawasan yang menghadapi tantangan tersebut. Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, menjadi hambatan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses transportasi semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019).

Dalam konteks tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan sekaligus mendukung pembangunan nasional. Peran TNI tidak hanya terbatas pada fungsi pertahanan, tetapi juga mencakup Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang



Tentara Nasional Indonesia). Melalui OMSP, TNI berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan.

Salah satu satuan TNI AD yang memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah perbatasan adalah Yonzipur 5/ABW. Sebagai satuan zeni tempur, Yonzipur 5/ABW memiliki kemampuan khusus dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan. Melalui penugasan dalam Satgas Pamtas RI–Malaysia, Yonzipur 5/ABW tidak hanya melaksanakan tugas pengamanan perbatasan, tetapi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial lainnya (TNI AD, 2022).

Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis yang sulit, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif agar pelaksanaan tugas Yonzipur 5/ABW dalam Satgas Pamtas dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Yonzipur 5/ABW dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat memiliki karakteristik geografis yang kompleks serta keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan publik yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, khususnya Yonzipur 5/ABW yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan wilayah, tetapi juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Peran ini menunjukkan pentingnya strategi yang tepat



dalam mengoptimalkan kontribusi satuan TNI terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersumber dari keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, maupun koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana strategi yang diterapkan oleh Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI–Malaysia, bagaimana strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan mengenai strategi yang digunakan Yonzipur 5/ABW dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi yang diterapkan oleh Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia, khususnya dalam konteks membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Analisis ini difokuskan pada bagaimana satuan Yonzipur 5/ABW merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi nyata dari strategi yang diterapkan oleh Yonzipur 5/ABW terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, baik dari aspek pembangunan fisik, peningkatan aksesibilitas, maupun dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut, baik yang berasal dari faktor



internal organisasi maupun faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi Yonzipur 5/ABW dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan peran TNI dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penelitian ini menggunakan teori strategi, kesejahteraan masyarakat, operasi militer selain perang dan perbatasan negara. Strategi merupakan konsep penting dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Clausewitz, strategi adalah penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang (Clausewitz, 1989). Dalam konteks modern, strategi tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lykke, strategi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*). Ketiga komponen tersebut harus selaras agar strategi dapat dilaksanakan secara efektif (Lykke, 2001). Tanpa keseimbangan antara tujuan, cara, dan sarana, strategi tidak akan berjalan optimal.

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi salah satu prioritas pemerintah karena wilayah tersebut memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik dan pembangunan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2020).

Operasi Militer Selain Perang merupakan salah satu tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara



Nasional Indonesia. OMSP mencakup berbagai kegiatan, termasuk membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui OMSP, TNI dapat berperan dalam pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. TNI memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Peran tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004).

Perbatasan negara merupakan garis pemisah antara dua negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, perbatasan negara merupakan batas wilayah kedaulatan negara yang harus dijaga dan dikelola secara efektif. Wilayah perbatasan juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Pengelolaan perbatasan tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali dan memahami makna, motivasi, serta dinamika fenomena yang diteliti secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menyusun gambaran komprehensif mengenai masalah sosial melalui teks, deskripsi rinci, dan interpretasi data yang diperoleh langsung dari lingkungan alamiah penelitian (Creswell, 2016). Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur yang fleksibel namun terarah, seperti wawancara dan penelaahan dokumen, guna menetapkan signifikansi isu dan memahami konteks kebijakan serta praktik di lapangan.



Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan menelaah secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan eksplorasi holistik terhadap peristiwa, aktor, dan dinamika yang terjadi dalam batas ruang dan waktu tertentu (Yin, 1994; McMillan & Schumacher, 2006). Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik dengan jumlah informan terbatas, sehingga kedalaman analisis lebih diutamakan dibandingkan keluasan cakupan (Ridwan & Tungka, 2024).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Wawancara semi terstruktur dipilih karena bersifat fleksibel namun terkontrol, memungkinkan peneliti menggali informasi mendalam melalui pertanyaan terbuka yang tetap berpedoman pada tema penelitian (Creswell, 2016; Ridwan & Tungka, 2024). Studi dokumen digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data primer melalui penelaahan buku, jurnal, peraturan, kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan (Herdiansyah, 2019).

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi, khususnya triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi (Satori, 2009). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan selama proses penelitian (Miles, 2014; Moleong, 2017). Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.



Hasil dan Pembahasan

Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia, khususnya Negara Bagian Sarawak. Provinsi ini memiliki luas wilayah yang cukup besar dan terdiri dari berbagai kabupaten dan kota yang tersebar di wilayah pesisir, dataran rendah, hingga wilayah pedalaman. Keberadaan Provinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah perbatasan menjadikannya memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara serta sebagai pintu gerbang aktivitas sosial, ekonomi, dan pertahanan negara. Selain itu, wilayah ini juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional (Halkis,2022).

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh hutan tropis, sungai-sungai besar, serta wilayah pegunungan dan perbukitan. Kondisi geografis ini memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi. Selain itu, kondisi geografis tersebut juga berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan hasil hutan sebagai sumber mata pencaharian utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.



Dari segi demografi, Provinsi Kalimantan Barat memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini menjadi salah satu kekuatan sosial yang mendukung stabilitas wilayah, namun juga memerlukan pendekatan yang tepat dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat. Penduduk di wilayah perbatasan umumnya tinggal di daerah pedalaman dengan tingkat kepadatan yang relatif rendah serta keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan sebagai daerah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Potensi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi kendala utama dalam pemanfaatan potensi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, dalam membantu pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan.

Wilayah Perbatasan Darat RI–Malaysia di Kalimantan Barat

Wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki panjang sekitar 960 km dan melintasi beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Wilayah ini merupakan bagian dari garis perbatasan internasional yang memisahkan wilayah Indonesia dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Keberadaan wilayah perbatasan ini memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga diperlukan pengawasan dan pengamanan yang optimal untuk mencegah berbagai pelanggaran batas negara.



Wilayah perbatasan ini ditandai dengan adanya patok-patok perbatasan yang berfungsi sebagai penanda batas wilayah kedua negara. Proses demarkasi perbatasan telah dilakukan sejak tahun 1975 hingga tahun 2000 dengan pemasangan berbagai jenis patok batas, sehingga batas wilayah kedua negara dapat ditentukan secara jelas. Penegasan batas wilayah ini merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah terjadinya konflik wilayah. Selain itu, keberadaan patok batas juga menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan oleh aparat keamanan.

Secara umum, wilayah perbatasan di Kalimantan Barat memiliki karakteristik geografis yang sulit dijangkau, dengan kondisi medan yang didominasi oleh hutan, pegunungan, dan sungai. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengamanan wilayah serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, keterbatasan akses transportasi dan fasilitas umum juga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam rangka menjaga keamanan wilayah perbatasan, TNI menempatkan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamantas) di berbagai titik strategis sepanjang wilayah perbatasan. Pos-pos ini berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pengamanan wilayah serta sebagai sarana pembinaan masyarakat. Keberadaan Pos Pamantas tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina

Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) merupakan salah satu satuan Zeni Tempur TNI Angkatan Darat yang memiliki tugas pokok dalam mendukung operasi militer, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun



Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagai satuan Zeni, Yonzipur 5/ABW memiliki kemampuan khusus dalam bidang konstruksi, mobilitas, dan bantuan teknik yang sangat penting dalam mendukung operasi militer dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan ini menjadikan Yonzipur 5/ABW sebagai salah satu satuan yang memiliki peran strategis dalam mendukung tugas pengamanan wilayah perbatasan.

Dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI–Malaysia, Yonzipur 5/ABW memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, staf, serta beberapa kompi yang ditempatkan di berbagai pos perbatasan. Struktur organisasi ini dipimpin oleh seorang Komandan Satgas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan operasi. Selain itu, terdapat unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas, seperti staf intelijen, operasi, logistik, dan teritorial. Struktur organisasi ini memungkinkan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Selain melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan, Yonzipur 5/ABW juga melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh Yonzipur 5/ABW memungkinkan satuan ini untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan wilayah perbatasan.

Selain kegiatan pembangunan fisik, Yonzipur 5/ABW juga melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat, seperti penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Yonzipur 5/ABW tidak hanya berperan dalam



menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran Yonzipur 5/ABW pada Satgas Pamtas RI - Malaysia

Yonzipur 5/ABW dalam Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia merupakan bagian dari implementasi fungsi TNI AD dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian, tugas tersebut tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan wilayah, tetapi juga mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur, pembukaan akses jalan, serta pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Yonzipur 5/ABW memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas keamanan sekaligus pembangunan wilayah perbatasan.

Pelaksanaan tugas tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan, di mana TNI berperan dalam memperkuat ketahanan wilayah melalui pendekatan teritorial dan pembangunan. Yonzipur 5/ABW sebagai satuan zenitempur memiliki kemampuan teknis dalam pembangunan konstruksi yang sangat dibutuhkan di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Dengan kemampuan tersebut, satuan ini mampu membantu membuka isolasi wilayah, memperbaiki akses transportasi, serta mendukung mobilitas masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.

Selain itu, pelaksanaan tugas Yonzipur 5/ABW juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kehadiran prajurit TNI yang terlibat langsung dalam membantu masyarakat menciptakan hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat. Hal ini penting dalam memperkuat ketahanan nasional di wilayah perbatasan, karena masyarakat yang merasa diperhatikan oleh



negara akan memiliki rasa nasionalisme dan loyalitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, tugas Yonzipur 5/ABW tidak hanya berdampak pada aspek fisik pembangunan, tetapi juga aspek sosial dan psikologis masyarakat.

Hambatan dan Upaya Yonzipur 5/ABW pada Satgas Pamtas RI–Malaysia

Dalam pelaksanaan tugasnya, Yonzipur 5/ABW menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Kondisi medan yang berat, seperti hutan lebat, perbukitan, serta akses transportasi yang terbatas, menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hambatan ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, karena memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang memiliki akses yang lebih baik.

Selain hambatan geografis, keterbatasan peralatan dan dukungan logistik juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas Yonzipur 5/ABW. Peralatan konstruksi yang terbatas serta kesulitan dalam distribusi logistik ke wilayah perbatasan mempengaruhi kecepatan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, keterbatasan personel juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, karena personel harus melaksanakan berbagai tugas secara bersamaan, baik tugas pengamanan maupun tugas pembangunan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Yonzipur 5/ABW melakukan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya membantu mempercepat pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan. Selain itu,



koordinasi dengan instansi terkait juga membantu dalam penyediaan dukungan logistik dan fasilitas yang dibutuhkan.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa Yonzipur 5/ABW memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah perbatasan. Kemampuan ini merupakan bagian penting dari strategi satuan dalam melaksanakan tugas secara efektif. Dengan mengatasi hambatan yang ada, Yonzipur 5/ABW dapat tetap melaksanakan tugasnya secara optimal dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Strategi Yonzipur 5/ABW pada Satgas Pamtas RI–Malaysia

Strategi yang diterapkan oleh Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI–Malaysia mencerminkan pendekatan yang terintegrasi antara aspek keamanan dan pembangunan. Strategi tersebut dirancang untuk mendukung tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah. Dalam konteks ini, strategi Yonzipur 5/ABW mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan tugas yang mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial wilayah perbatasan.

Strategi tersebut juga mencerminkan konsep strategi yang mencakup tujuan (ends), cara (ways), dan sarana (means). Tujuan utama strategi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah perbatasan. Cara yang digunakan meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sedangkan sarana yang digunakan meliputi personel, peralatan konstruksi, serta kemampuan teknis yang dimiliki oleh Yonzipur 5/ABW sebagai satuan zenitempur.

Selain itu, strategi Yonzipur 5/ABW juga menekankan pentingnya pendekatan teritorial dan komunikasi sosial dengan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat serta meningkatkan



partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan stabil.

Dengan demikian, strategi Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan Satgas Pamantas RI–Malaysia dapat dikatakan efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keamanan wilayah. Keberhasilan strategi ini menunjukkan bahwa peran TNI, khususnya Yonzipur 5/ABW, sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan memperkuat ketahanan nasional.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan tugas Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia di Kalimantan Barat dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Yonzipur 5/ABW memiliki peran yang sangat strategis tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di mana TNI berperan dalam membantu pemerintah daerah melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan. Kehadiran Yonzipur 5/ABW memberikan kontribusi nyata dalam membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.

Pelaksanaan tugas Yonzipur 5/ABW dalam Satgas Pamantas RI–Malaysia menunjukkan bahwa satuan ini mampu menjalankan fungsi pengamanan wilayah



sekaligus fungsi pembangunan secara terpadu. Kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembukaan dan perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan karya bakti bersama masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keterlibatan Yonzipur 5/ABW dalam membantu masyarakat juga memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memperkuat ketahanan wilayah perbatasan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, Yonzipur 5/ABW menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan kondisi geografis wilayah perbatasan yang sulit, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan dukungan logistik. Kondisi medan yang berat, akses transportasi yang terbatas, serta keterbatasan peralatan konstruksi menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, Yonzipur 5/ABW mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Strategi yang diterapkan oleh Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan Satgas Pamtas RI–Malaysia telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Strategi tersebut mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan kemampuan teknis satuan zeni tempur secara optimal. Selain itu, pendekatan teritorial dan komunikasi sosial yang dilakukan oleh Yonzipur 5/ABW juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Strategi ini mencerminkan integrasi antara tujuan, cara, dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan wilayah perbatasan.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Yonzipur 5/ABW dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI–Malaysia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Peran Yonzipur 5/ABW tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan wilayah, tetapi juga mencakup peran sebagai agen pembangunan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi antara fungsi pertahanan dan pembangunan merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Daftar Pustaka

- Alma, B. dan R. H. 2008. *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Araryaputra, A., Maulidia, H., & Ryanindityo, M. (2024). Strategi penguatan fungsi keimigrasian di perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia. *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850>
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (2015). *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2015–2019*. Jakarta: BNPP.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*.
- BNPP. (2017). *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019*. Jakarta: BNPP.
- BNPP. (2020). *Rencana Strategis BNPP 2020–2024*.
- Bryson. 2017. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. *Mixed Methods Procedures. In Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches*.
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Konplik*. Fajar Interpretama Offset, Jakarta.



- Dewa Gede Sudika Mangku. Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 4, Number 2, Desember 2018*, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia. pp. 167-174
- Dr. Agus Subagayo, S.IP., M.Si, Dr. Indra Kristan, S.IP., S.Kom., M. A. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Garut : Inteligencia Media.
- Ferrel, O.C & D, Harline. 2017. *Marketing Strategy. South Western: Thomson*. Corporation. International, Euromonitor.
- Ford, M. (2013). Border security and migration in Indonesia–Malaysia borderlands. *Asia Pacific Journal of Anthropology*. DOI: 10.1080/14442213.2013.848053
- Gusfira, N., & Irawan, A. (2023). Penanggulangan kejahatan karantina di perbatasan Kalimantan Utara. *Jurnal Mubeza*, 13(2). DOI: <https://doi.org/10.54604/mbz.v13i2.358>
- Halkis, M. 2022, *Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu pengantar*, (trans. Philosophy of Science on Defense An introduction), Unhan Press, Bogor
- International Organization for Migration (IOM). (2019). *Border Management in Southeast Asia*.
- Jones, L. (2012). ASEAN and border security governance. *International Affairs*, 88(3). DOI: 10.1111/j.1468-2346.2012.01095.x
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Strategi Pertahanan Negara*.
- Kementerian Pertahanan. 2024. *Strategi Kebijakan Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Lavka Vanya, N. (2023). Defense diplomacy in protection of Indonesia–Malaysia border. *Diplomacy and Global Security Journal*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2967>



- Leifer, Michael. (1983). *Indonesia's Foreign Policy*. London: Allen & Unwin.
- Liddell-Hart, B. H. 1967. *Strategy (2nd Edition)*. New York, NY: Frederick Praeger.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Nur, S., Moad, & Novianty, F. (2022). Nasionalisme di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.31571/pkn.v6i1.3480>
- Pamungkas, C. (2017). Pengelolaan perbatasan dan hubungan antaretnis di Bengkayang. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.18196/hi.62110>
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pertahanan Negara.
- Peraturan Panglima TNI tentang Tugas Pokok Pengamanan Perbatasan.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres BNPP.
- Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad. (2014). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rabasa, Angel & Chalk, Peter. (2001). *Indonesia's Transformation and the Stability of Southeast Asia*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara*.



- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Rumley, D., & Minghi, J. (2002). Border security and territoriality. *Geopolitics*, 7(2). DOI: 10.1080/714000946
- Ryamizard RC. 1999. *"Konsistensi dan Komitmen TNI" dalam Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan*. Editor: Agus Wirahadikusumah dkk. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saiman. (2017). Kepentingan pemerintah pusat dalam pembangunan perbatasan Kalimantan Indonesia–Malaysia. *Jurnal Sospol*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4405>
- Setiawan, E. (2024). Kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam pengamanan perbatasan melalui patroli terkoordinasi di Kalimantan Barat. *Diplomacy and Global Security Journal*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4579>
- Subagyo, A. (2021). Peran TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia–Malaysia. *Insignia Journal*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.1.2673>
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukardi, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryadinata, Leo. (2018). *Indonesia's Foreign Policy under President Jokowi*. Singapore: ISEAS Publishing.



- Sutisna Sobar (ed). 2004. *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*. Pusat Pemetaan Batas Wilayah. BAKOSURTANAL. Cibinong.
- Syamiajaya, N. A. (2024). Optimalisasi dislokasi pasukan dalam pengamanan perbatasan Kalimantan Barat. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2066>
- Tan, A. (2016). Maritime and land border security in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 38(1). DOI: 10.1355/cs38-1d
- TNI. (2019). *Doktrin Kartika Eka Paksi*. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang TNI
- Undang-Undang RI No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Walker, A. (2011). Borderlands and security in Southeast Asia. *Journal of Borderlands Studies*. DOI: 10.1080/08865655.2011.641589
- Wibowo, A. (2018). Border management and national security in Indonesia. *Journal of Defense & Security Analysis*. DOI: 10.1080/14751798.2018.1478145
- Widjojo, A. 2007. *Komando Teritorial dalam Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi).
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wuryandari, Ganewati. (2018). *Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan Di Kalimantan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zed, Mestika. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.